

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH SEDERHANA LAYAK
HUNI DI KECAMATAN KUBU BABUSSALAM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Oleh:

Mus Mulyady

(e-mail: mus_mulyady@yahoo.com)

Pembimbing: Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi-Prodi Administrasi Publik-Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jln. H.R Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/fax. 0761-63277

ABSTRAC

Simple habitable Home Support Program RLH is a program aimed at eradicating poverty through the development of habitable homes for poor people who still have uninhabitable houses intended to improve and provide basic community infrastructure needs in kepenghuluan / kelurahan, implemented through empowerment patterns the community of the downstream rokan district program which is poured into regent 19 of 2014 as a guideline in the implementation of development, the local community is an important actor in the implementation of this program.

The purpose of this study is to understand Imaplementasi Simple humble home support program in sub-district of Babusallam district rokan hilir district. Theoretical concepts used by researchers are the factors that influence the implementation of policies used by George Edward III where the indicators used are communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research uses descriptive qualitative method, using interview technique, observation and documentation.

the results showed implementation of housing programs habitable home has not run well, the implementation of the do still many that are not in accordance with existing guidelines such as community involvement in this program is not maximal. Meanwhile, the inhibiting factors in the implementation of the Simple Habitable Home subsidy program are the inaccuracy of the target, the lack of community participation and the sustainability of the program

Keywords: Policy Implementation, community-based self-development, Simple Habitable House.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Rokan Hilir sangat kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) terutama minyak bumi dan hasil alam lainnya, namun demikian menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hilir, di Kabupaten Rokan Hilir terdapat penduduk miskin sekitar 9,30% dari seluruh jumlah penduduk. Pada umumnya disetiap kecamatan masih banyak dijumpai pemukiman masyarakat yang kurang layak untuk dihuni bahkan masih banyak masyarakat miskin yang belum memiliki rumah sama sekali terutama dijumpai pada wilayah pesisir Kabupaten Rokan Hilir.

Kebutuhan rumah bagi masyarakat Kubu Babusalam masih banyak yang tidak memenuhi standar layak huni. Tercatat di tahun 2015 jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Kubu Babusalam sebanyak 374 unit yang tersebar di 12 kepenghuluan atau desa. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berupaya mengentaskan kemiskinan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) mengeluarkan Program Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan sumber daya manusia, program ini di laksanakan pada tahun 2001 hingga sampai saat sekarang.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyediakan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di kepenghuluan/kelurahan, yang dilaksanakan melalui pola pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan melalui pola pemberdayaan masyarakat ini perlu didukung oleh struktur organisasi yang melibatkan unsur instansi pemerintah kabupaten, kecamatan, kepenghuluan/kelurahan serta kelompok masyarakat (POKMAS) sebagai pelaksana kegiatan di tingkat kepenghuluan/kelurahan. Dengan demikian diharapkan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya kepenghuluan/kelurahan semakin tumbuh dan berkembang. Jumlah rumah keseluruhan di Kecamatan Kubu Babusalam sebanyak 4959 unit dengan jumlah KK sebanyak 5598 keluarga dan dengan jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Kubu Babusalam sebanyak 374 unit pada Tahun 2015. Hal ini dapat di lihat tabel berikut ini:

Table 1.1
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Kecamatan Kubu Babusalam
Tahun 2015

No	Nama Desa	Jumlah Rumah
1	Jojol	84
2	Pulau Halang Belakang	22
3	Pulau Halang Hulu	17
4	Pulau Halang Muka	3
5	Rantau Panjang Kiri	18
6	Rantau Panjang Kiri Hilir	56
7	Sungai Majo	16
8	Sungai Majo pusako	35
9	Sungai Panji-Panji	21
10	Sungai Pinang	35
11	Teluk Nilap	32

12	Teluk Nilap Jaya	16
	Total (Rumah)	374

Sumber : Kecamatan Kubu

Babusalam Kabupaten Rokan Hilir 2015

Jumlah Rumah Yang tidak layak huni terbanyak di kepenghuluan jojol dengan jumlah 84 unit rumah sedangkan kepenghuluan dengan jumlah Rumah tidak layak huni yang paling sedikit adalah kepenghuluan pulau halang muka hanya 3 unit. Pembangunan RSLH di laksanakan dengan pola swadaya kelola atau pemberdayaan masyarakat yang apabila di kalkulasikan per unitnya mencapai 72 samapai 85 juta per unit tergantung lokasi pembangunannya .

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti lakuakn, dalam pelaksanaan program rumah sederhana layak huni di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir, terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yaitu :

1. Masih belum tepatnya masyarakat yang mendapatkan bantuan Rumah Layak Huni dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir,
2. Pelaksana pembangunan rumah sederhana layak huni seharusnya dikerjakan oleh kelompok masyarakat (POKMAS), tetapi masih ada yang dilakukan oleh masyarakat luar daerah tanpa melibatkan masyarakat setempat
3. Kurangnya keterlibatan dan kerjasama masyarakat akan program RSLH

4. Berkelanjutan merupakan salah satu prinsip dalam program RLH ini,
5. Keberlanjutan program ini belum maksimal.

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.**

A. KONSEP TEORI

1. Konsep Implementasi kebijakan

Menurut Dwijayanto (2003: 161) Implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) intervensi tiu sendiri. Sedangkan Agustino (2016: 126) Implementasi kebijakan secara sederhana dapat di artikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi keijakan merupakan suatu proses yang bigitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Selanjutnya menurut Edward III dalam nawawi (2009:136), mengatakan implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat variable, yaitu:

1. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa di mensi

penting yaitu transformasi informasi (*consistency*). Di mensi transformasi menghendaki agar informasi jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam impelmentasi kebijakan. Sedangkan di mensi konsistensi menghendaki agar informasi yang di sampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2. Sumber Daya (*Resource*)

Sumber daya berkaitan dengan segala dumber yang dapat di gunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran Fasilitas, informasi dan kewenangan yang di jelaskan sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Anggaran
- c. Fasilitas
- d. Infoemasi dan kewenangn

3. Disposisi (*Dispotion*)

Kecenderungan perilaku atau karekteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus di miliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi

Sikap dari pelaksana kebijakn akan sangat berpengaruh dalam implemtasi kebijakan.

Apabila implemntor memiliki sikap yang baik maka di akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang di inginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implemntasi tidak akan terlekasana dengan baik

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijkan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakn biasanya sudah di buat SOP (Standar Operasinal Prosedur). SOP menjadi pedoman setiap implementor dalam bertindak agar setiap pelaksana kebijkan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yangterlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

A. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang memberikan keterangan kepada penenliti. informan adalah istilah yang memberikan informasi kepada penenliti. dalam penelitian ini penenliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Adalah teknik pengambilan samel sumber data

dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut paling tahu atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelaskan objek/situasi social yang akan di teliti Sugiyono (2012:96). sesuai dengan masalah dan tujuan yang akan di dapatkan dari penelitian maka peneliti menetapkan beberapa yang akan menjadi informan penelitian, diantaranya :

- a. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir
- b. Kelompok Masyarakat (POKMAS)
- c. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)
- d. Camat dan Perangkat Kependhuluan / Desa
- e. Penerima Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni
- f. Masyarakat

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dalam permasalahan yang di hadapi yaitu data tentang pelaksanaan peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa Dengan pola Pemberdayaan Masyarakat Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Data yang diperoleh langsung dari key informan antara lain meliputi: Hasil dari

wawancara dengan pihak terkait, Observasi yang dilakukan penulis dilapangan.

2. Data skunder

Yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung melalui dokumen program, laporan-laporan, buku-buku dan data lainnya yang sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi menurut Hadi dalam Sugiyono (2003:166) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, agar penelitian mendapatkan gambaran selengkap mungkin, maka peneliti mengadakan pengamatan dan mencatat secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang ada di lapangan. Observasi ini yaitu pengamatan langsung pada objek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu yang berhubungan dengan program pembangunan Rumah Sederha Layak Huni. Observasi di lakukan terhadap Kondisi di lapangan masyarakat penerima RSLH, serta target sasaran RSLh.

2. Wawancara

wawancara merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui percakapan langsung atau di kenal dengan *Interview* atau wawancara antar peneliti dengan narasumber. Wawancara yang mendalam untuk mengali informasi sedetil mungkin. Wawancara di lakukan dengan informan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

3. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca berbagai literature seperti buku, jurnal dan pemberitaan media massa seputar masalah penelitian atau dapat juga diambil dari beberapa dokumen mengenai gambaran umum lokasi penelitian atau hal-hal lain yang dapat mendukung hasil penelitian
4. Dokumentasi yaitu pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti : gambar, foto, dokumen secara tertulis dan lain-lain.

D. Analisis Data

Analisis data yang di gunakan adalah analisa yang bersifat penalaran mengenai fenomena-fenomena yang akan di teliti, setelah data di kumpulkan melalui teknik pengumpulan data, kemudia penulis menganalisi data secara analisa deskriptif. Dalam penelitian ini di gunakan prinsip kulaitatif. Dengan menggunakan triangulasi data dengan melakukan proses cek dan recheck anantara satu informan denagn informan lainnya.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan pemerhatian pada pemyederhanan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang di peroleh dari catatann lapangan. Cara merudksinya dengan meringkas, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan meulis memo.

2. Penyajian data

Penyajian data di rancang guna mengabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah di raih, misalnya di tuangkan dalam berbagai jenis table, grafik atau bgan. Penyajian data yang di lakukan dengan menyusun sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penerakian kesimpulan adlah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfiguaras, yang mungkin alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan juga di verifikasi yaitu pemikiran kembalayang melintas dalam pikiran penganalisis salam penyimpulan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, tukar pikiran di antara teman sejawat, atau meminta respon atau komentar kepada informan yang telah di jaring datanya untuk mencoba kesimpulan yang telah di simpulkan pneliti, kekohonya dan kecocokanya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir

Keberhasilan Implementasi suatu program dapat di lihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksana/penerapan kebijakan dengan rencana, tujuan dan sasaran kebijaksanaan itu sendiri serta memberikan dampak yang

positif bagi pemecahan permasalahan yang di hadapi. Dari hasil pemapran peniliti di atas implementasi dari program tersebut cukup baik, tetapi pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada saat pelaksanaannya. Menurut Edward III (1980,1) menegaskan bahwa ada 4 (empat) factor yang mempengaruhi Implementasi

1. Komunikasi

Untuk mencapai tujuan dari hasil yang telah di rencanakan sangat di butuhkan komunikasi yang baik antar pelaksana/pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan RSLH. Musyawarah merupakan salah satu prinsip yang penting dalam program ini, pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga mendapatkan dukungan (acceptable) hal ini berlaku baik pada pemilihan lokasi penentuan mekanisme pelaksanaan pembangunan serta pengadaan maupun pada penetapan mekanisme pengelolaan prasarana kepenghuluan terbangun. Musyawarah merupakan proses dalam kegiatan ini mulai dari sosialisasi, permohonan calon, penetapan calon, verifikasi dan tinjauan langsung hingga samapai pada penyerahan dan serah terima kepada penerima Rumah Layak Huni.

Mengingat bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan di lakukan dengan pola pemberdayaan masyarakat dan dengan cara swakelola masyarakat setempat kepenghuluan/kelurahan, maka

dengan demikian masyarakat adalah aktor utama dalam kegiatan pembangunan, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pendukung. Komunikasi dengan cara bermusyawarah di laksanakan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama untuk menentukan dan menetapkan suatu keputusan/sikap yang di pilih selama program ini berjalan. Hal ini juga menghindari supaya tidak terjadi penyelewengan selama pelaksanaan

Kemudian penulis menanyakan bagaimana Musyawarah di laksanakan, berikut hasil wawancara penulis dengan bapak Zulkifli selaku Ketua POKMAS sekaligus menjabat sebagai Ketua LPM desa Sungai Majo pada tanggal 8 januari 2018, hasil wawancaranya :

“pembentukan POKMAS yang kami lakukan berdasarkan musyawarah di tingkat kepenghuluan saat itu di hadiri lebih kurang 20 orang, 20 orang tersebut yaitu pegawai kepenghuluan dan anggota saya di LPM, setelah kami melakukan pemungutan suara maka terpilihlah saya sebagai Ketua POKMAS dan selanjutnya kami menentukan sekretaris dan bendahara”

Dari hasil wawancara di atas, bahwa musyawarah merupakan bentuk komunikasi yang di laksanakan setiap kegiatan pembangunan Rumah Layak Huni, namun musyawarah yang laksanakan harus sesuai dengan prinsip yang telah ada mengingat program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat, seharusnya musyawarah yang di lakukan tingkat kepenghuluan ini bukan hanya di hadiri aparat kepenghula dan LPM saja namun masyarakat semestinya di libatkan secara langsung di setiap musyawarah yang di laksanakan di kepenghuluan.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berkaitan dengan staf atau aparat pelaksana apakah sudah cukup tersedia atau perlu adanya penambahan implementor kebijakan. Ketersediaan jumlah pelaksana yang cukup menjadi factor penentu suatu kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya di sebabkan oleh karena pelaksana yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak mopeten di bidangnya, namun jumlah pelaksana yang memadai belum menjamin keberhasilan implementasi suatu kebijakan, pelaksana harus mempunyai keterampilan dan kompetensi di bidangnya masing-masing.

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, professional dan kopetensi dalam bidangnya. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manuisa apakah sudah cukup melingkupi seluruh kelompok sasaran. Berikut hasil

wawancara peneliti dengan bapak Zamri ST.MT selaku Kasi pembangunan Sarana dan Prasarana Desa pada tanggal 4 januari 2018, berikut hasil wawancara:

“Program ini merupakan program dengan swakelola masyarakat jadi untuk pelaksanaannya sepenuhnya di laksanakan oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS) setiap kepenghuluan di tingkat kabupaten BAPEMAS hanya mengawasi dalam setiap pembangunannya”

Berdasarkan wawancara peneliti di atas untuk teknis pelaksanaan pembangunan memang di serahkan sepenuhnya kepada masyarakat kepenghuluan setempat artinya masyarakat setempat yang menjadi pelaksana untuk teknis pembangunannya

b. Anggaran

Pembangunan Rumah Layak Huni di kecamatan Kubu Babusallam Kabupaten Rokan Hilir penenliti tidak menemukan permasalahan yang terjadi, pencarian dana untuk pembangunan berjalan dengan lancar, berikut wawancara penenliti dengan Ketua POKMAS kepenghuluan Sei Majo bapak

Zulkifli pada tanggal 8 Januari 2018, berikut hasil wawancara :

“pembiayaan terus mengalir tidak ada terjadi kendala, hanya saja kami harus bersama-sama dengan POKMAS lainnya mengajukan dana ke BAPEMAS”

c. Fasilitas

Fasilitas ataupun sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam program ini ketersediaan fasilitas akan menunjang pengimplementasian program tersebut semakin baik fasilitas penunjang dalam melaksanakan program maka akan efektif program itu di implementasikan, dalam program ini yang di maksud dengan fasilitas ialah ketersediaan infrastruktur berupa jalan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Berikut wawancara peneliti dengan bapak Zamri ST.MT selaku Kasi pembangunan Sarana dan Prasarana Desa pada tanggal 4 Januari 2018, berikut hasil wawancara:

“fasilitas yang di maksud dalam pembangunan Rumah Layak Huni ialah seperti bahan-bahan material bangunan, alat bangunan lainnya dan infrastruktur seperti jalan, jalan sangat mempengaruhi

kelancaran pembangunan bias kita lihat di Kubu Babusallam aksesnya memang agak sulit karna masih ada jalan yang rusak parah namun sampai sekarang pembangunan insya allah selalu tetap waktu”

Tidak hanya dalam pembangunan Rumah Layak Huni saja yang mengharuskan infrastruktur jalan haruslah mendukung namun program yang lain juga mengharuskan hal yang sama, meski demikian pembangunan Rumah Layak Huni di Kecamatan Kubu Babusallam sampai sekarang belum pernah terjadi keterlambatan pembangunan

d. Informasi dan Wewenang

Informasi juga menjadi factor penting dalam implementasi kebijakan terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang di laksanakan sesuai dengan yang di kehendaki, informasi yang di maksud dalam program ini ialah mekanisme pembangunan Rumah Layak Huni yang secara

pelaksanaanya di lakukan oleh POKMAS setempat, berikut wawancara peneliti dengan bapak Zamri, ST. MT selaku Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa pada tanggal 4 januari 2018, berikut adalah hasil wawancaranya :

”masalah transparant dalam program ini kami juga sudah melakukan sosialisasi terhadap program ini kami melayangkan surat kepada camat dan penghulu untuk mensosialisasikan program RLH ini, setelah sosialisasi bersama camat dan penghulu selanjutnya kami juga melakukan pelatihan terhadap POKMAS yang telah di pilih melalui musyawarah di kepenghuluan kami mensosialisasikan program ini sekaligus melakukan pelatihan, supaya program ini berjalan dengan pedoman yang ada”

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan secara wewenang BAPEMAS telah menyampaikan informasi berupa sosialisasi kepada tiap kecamatan yang ada, dan selanjutnya juga di lakukan pelatihan langsung kepada POKMAS yang sudah di bentuk masing-masing kepenghuluan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana adalah suatu perilaku yang di tunjukan oleh elemen-elemen dari suatu kegiatan implementasi kebijakan untuk mampu menyelaraskan adanya penumbuhan perilaku dari sikap yang di tunjukan oleh para pengembang kebijakan pemerintah pada subjek dan objek kebijakan. Termasuk di dalamnya berbagai bentuk program kegiatan dan tidak lanjut dari suatu kegiatan pembangunan.

Kecenderungan perilaku atau karekteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus di miliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Setiap pengimplementasian suatu kebijakan harus menekankan nilai kejujuran dan komitmen implementor dalam menimplementasikan suatu kebijakan, supaya rencana awal kebijakan yang telah di susun berjalan sesuai dengan yang telah di rumuskan, berikut wawancara peneliti dengan pengendali program tingkat Kabupaten Bapak Zamri ST. MT selaku Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa pada tanggal 4 januari 2018, berikut adalah hasil wawancaranya :

“sebenarnya program dari Bupati Rokan

Hilir ini sangatlah bagus, tujuan program ini kan mensejahterakan masyarakat Rokan Hilir yang masih mempunyai tempat tinggal yang tidak layak huni di tambah lagi program ini berbasis swakelola masyarakat setempat sehingga program ini juga bisa membuka lowongan pekerja sebagai tukang untuk pembangunan, makanya di perlukan kejuruan dan komitmen POKMAS dan PPTK dalam melaksanakan Program ini dengan baik”

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah di buat SOP (Standar Operasional Prosedur). SOP menjadi pedoman setiap implementor dalam bertindak agar setiap pelaksana kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Pelaksanaan program ini harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan, SOP yang di maksud program ini ialah setiap

pelaksanaannya harus berdasarkan Prinsip dan Pendekatan yang telah di tuang dalam pedoman pelaksanaan. Di atas peneliti juga sudah membahas apakah prinsip dan pendekatan sudah di laksanakan sesuai dengan pedoman yang ada.

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Kubu Babussalam

1. Ketidak Tepat Sasaran

Penentuan usulan calon penerima RLH di lakukan oleh POKMAS, POKMAS yang bertugas sebagai pelaksana mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di kepenghuluan serta memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di kepenghuluan secara komprehensif, berlaku adil dan tidak diskriminatif, namun setelah peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan peneliti menemukan ada kepenghuluan yang menggunakan metode undian untuk menentukan penerima calon rumah Layak Huni, seperti wawancara peneliti bersama Ibu Teti Istri Pak Mukhtar, salah satu masyarakat Kepenghuluan Rantau Panajang Kiri yang menerima bantuan Rumah layak huni, berikut hasil wawancara

“rumah ini di bangun pada tahun 2015, sebelum di tetapkan yang menerima kami di panggil untuk datang ke kantor penghulu kemudian kami di beri penjelasan terkait Rumah Layak Huni yaitu program kabupaten

Rokan Hilir memberikan rumah bagi masyarakat miskin yang membutuhkan, pada saat penetapan penerima Rumah Layak Huni saat itu menggunakan Metode Undian karna yang menerima rumah ini hanya 2 orang sedangkan yang membutuhkan lebih dari 2 orang, metode undian seperti ini tentu nasib-nasipan padahal pada saat itu ada yang lebih membutuhkan”(Minggu, 7 januari 2018)

Dalam hal ini peneliti merasakan kurangnya pemahaman akan pelaksanaan program dan kurangnya profesionalitas dalam menentukan penerima Rumah layak huni, seharusnya penentuan penerima berdasarkan syarat dan kategori yang sudah di tetapkan, dan memprioritaskan bagi yang betul-betul membutuhkan berdasarkan syarat dan ketentuan yang ada.

2. Partisipatif Masyarakat

Dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni di akui memang jauh dari makna sebenarnya pembangunan yang berbasis kemasyarakatan. Sejauh ini yang peneliti dapatkan dari beberapa kali menanyakan bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung masih sangat jauh dari harapan yang sebenarnya. Hal ini juga di sampaikan oleh Ketua Pokmas Kepenghuluan Teluk Nilap Bapak Suemi pada tanggal 8 januari 2018, berikut hasilnya :

“selama pelaksanaan pembangunan yang kami

lakukan partisipasi masyarakat sangatlah kurang, keterlibatan masyarakat setempat dan kepedulian masyarakat akan pembangunan rumah layak Huni bagi masyarakat miskin ini masih jauh”

Tidak hanya di saat pembangunan fisik peneliti juga menemukan kurangnya partisipasi masyarakat setempat di saat musyawarah yang di lakukan di kepenghuluan beberapa kali di adakan musyarah di tingkat kepenghuluan namun keikutsertaan masyarakat juga kurang seperti hasil wawancara peneliti dengan Sekdes Kepenghuluan Teluk Nilap bapak Syamsuri. S.ag, berikut hasil wawancara :

“kurangnya partisipasi masyarakat dalam program ini masih kurang, di karnakan pola pikir masyarakat menganggap ini bukan tanggung jawab mereka, program ini merupakan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat contohnya saja pada saat musyawarah masyarakat masih enggan untuk menghadiri, dan akhirnya musyawarah kami lakukan hanya dengan pegawai kepenghuluan”.(Senin, 8 januari 2018)

Kurangnya partisipatif masyarakat bukan saja karna pola piker masyarakat nya namun peneliti juga menemukan sosialisasi yang di lakukan juga kurang, kebanyakan penenliti menemukan hanya di lakukan

kepada POKMAS dan Penerima saja sedangkan masyarakat secara umum tidak mengetahui informasi tersebut, mengingat program ini berprinsip swakelola masyarakat, seharusnya masyarakat aktif dan dapat bersama-sama mengawasi setiap tahap pelaksanaannya sehingga pelaksanaan dalam program ini bisa berjalan dengan sesuai pedoman yang telah ada.

3. Keberlanjutan Program

Salah satu prinsip pengelolaan penting dalam program Rumah Sederhana Layak Huni adalah berkelanjutan (sustainable) penyelenggaraan program ini di harapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat yang di tandai dengan adanya pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana kepenghuluan yang madiri oleh masyarakat, pada prinsip ini sangat penting mengingat tujuan program ini adalah mengentaskan kemiskinan. Dengan begitu untuk mencapai tujuan tersebut maka akan sangat di tetukan keberlanjutan di setiap tahunnya, sehingga dengan di bangunya Rumah Sederhana layak Huni ini tiap tahunnya akan mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Kubu Babusallam.

Keberlanjutan program Rumah Sederhana Layak Huni ini juga menandai keberhasilan pemerintah dalam mengimplentasikan program ini. Karena makna pembangunan sendiri meruapakan suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak yang tidak pernah kenal

berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dalam perbaikan mutu hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-perubahan. Aprilia Theresia, (2014:13)

Lebih lanjut mengenai keberlanjutan Program Rumah Sederhana Layak Huni ini penulis menayakan langsung kepada bapak Zamri, ST. MT selaku Kasi pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, berikut hasil wawancara :

“memang prinsip pengelolaan Rumah Layak huni ialah sustainable berlanjut sehingga program ini dapat membrikan kemanfaatan kepada masyarakat miskin, sehingga masyarakat di Kabupaten Rokan hilir terkhususnya Kecamatan Kubu Babusallam semakin berkurang, dan kita juga berharap program ini berlanjut setiap tahunnya namun di tahun 2016-2017 kita tidak ada membangun Rumah layak huni di kecamatan Kubu Babusallam, di karnakan Rokan Hilir lagi depisit anggaran” (Kamis, 4 januari 2018)

Dari wawancara di atas artinya keberlanjutan akan program ini masih belum maksimal hal ini juga di sampaikan oleh bapak Irwan Nurfandi. S.kep selaku Kasi pembangunan Kecamatan Kubu

Babusallam wawancara peneliti, berikut hasil wawancara :

“pembangunan Rumah Layak Huni di Kecamatan Kubu Babusallam terakhir di bangun pada tahun 2015 itu terakhir kalinya, untuk tahun 2016-2017 sampai sekarang kami belum punya kejelasan dan kami juga sudah memasukan nama-nama calon penerima Rumah Layak Huni di tingkat kecamatan namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Pembangunan yang ada sekarang ini dari provinsi itupun hanya beberapa desa yang dapat” (Senin, 8 Januari 2018)

Dari wawancara di atas kurangnya Komitemen Pemerintah akan keberlanjutan program ini, hal ini tentu bertentangan dengan prinsip program tersebut yang tertuang di Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni Di kecamatan Kubu Babusallam masih belum maksimal menurut Edward III ada Empat Variable yang mempengaruhi Implementasi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktural Birokrasi. 1. Komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan masih

belum berjalan dengan baik seperti musyawarah yang merupakan wadah untuk berkomunikasi menyampaikan dan memutuskan tidak di laksanakan sesuai dengan pedoman yang ada. 2. Sumber daya menurut teori Edward III ada tiga yaitu a. sumber daya manusia, berdasarkan memapran di atas tidak semua kepenghuluan memiliki SDM yang Profesional dalam membangun RLH b. Anggaran, kecakapan modal masih belum konsiten keberlanjutan terhenti seharusnya program ini bersifat berkelanjutan c. Fasilitas, merupakan hal yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan berdasarkan pembahsan di atas fasilitas yang ada memang masih kurang seperti infrastruktur jalan yang masih banyak yang rusak, namun dalam pelaksanaan pembangunan belum pernah terjadi keterlambatan, hanya saja bahan material menjadi mahal 3. Disposisi atau sikap pelaksana, karekter penting yang harus di miliki oleh pelaksana kebijakan ialah kejujuran dan komitmen yang tinggi. berdasarkan pembahasan di atas Kejujuran dan Kmitmen masih terlihat banyak terjadi penyimpangan 4. Struktur Birokrasi,ada dua hal penting dalam struktur birokrasi SOP (*Standar Operasional Prosedur*) dan struktur birokrasi lingkungan, ekonomi dan politik. SOP dalam program ini sudah di tuang dalam PERBUP nomor 19 tahun 2014. Meskipun SOP sudah di formulasikan masih saja pengimplementasiannya belum

- berjalan dengan seharusnya, lingkungan politik juga menjadi factor mengapa setiap pelaksanaan program ini tidak berjalan sesuai dengan pedoman yang ada
2. Ada 3 faktor yang peneliti anggap sebagai penghambat dalam program ini yaitu 1. Ketidaktepatan Sasaran yang masih belum maksimal kurangnya keberpihakan terhadap kaum miskin, 2 Partisipatif masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat akan keterlibatan program dan masih belum maksimalnya sosialisasi yang di lakukan oleh pelaksana program sehingga masyarakat kurang keterliabatanya, 3 keberlanjutan program yang di maksud ialah pengelolaan anggaran yang di lakukan masih belum baik sehingga program tersebut terhenti padahal program bertujuan guna mengentaskan kemiskinan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut :

1. Sosialisasi sebaiknya di lakukan langsung kemasyarakat dengan melibatkan pemerintah setempat seperti RT/RW supaya keterlibatan masyarakat akan program ini betul-betuk terlaksana
2. Pemerintah harus mampu mengolala keuangan demi keberlanjutan akan program ini,
3. Pengawasan sebaiknya melibatkan masyarakat secara berkelanjutan agar terciptanya tranparansi dan partisipasi

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman Dan Prasarana Desa Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.